

AKUNTABILITAS PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM KOLABORASI *RECOVERY* EKONOMI DAN *SUSTAINABILITY* PASCA COVID-19

Nunuk Novianti^{1*}, Elloni Shenurti²

¹Universitas Bina Insani Bekasi

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta

*Email Korespondensi: nunuknovianti@binainsani.ac.id

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic, as a public health emergency, had a major impact on the economy in countries around the world, especially in Indonesia. The Covid-19 pandemic has created economic, fiscal and social pressure, making it necessary. The author's aim in this research is to analyze Indonesia's post-Covid-19 economic accountability in collaborative recovery and sustainability from statistical data on economic growth in Indonesia along with Government Financial Reports as well as actions and efforts that have been taken by the Government. The research method used in this research study is a systematic literature review. The research results related to the steps that have been taken on the program and the government's efforts to collaborate in economic recovery and sustainability after the Covid-19 pandemic, show a significant positive side for Indonesia's economic growth through various policies implemented and collaboration with other countries. else in the world. The reduction in interest rates shows that in February 2021 it fell to 3.50% from the previous 3.75% in November 2020 to January 2021, creating momentum for changes in the national economic recovery. In 2022, the Indonesian economy experienced growth of 5.31%, higher than in 2021 which experienced growth of 3.70% and in 2020 when the Covid-19 pandemic occurred, it was -2.07%. The NPI noted that in 2021 the Indonesian economy experienced a surplus of 13.46 billion US dollars, higher than in 2020 which was recorded at 2.60 billion US dollars. The current account balance in 2021 experienced a surplus of 3.33 billion US dollars. The Government's success in overcoming Covid-19 is demonstrated by the high balance of capital and financial transactions in 2021 amounting to 11.75 billion US dollars, higher than in 2020 amounting to 7.92 billion US dollars. Collaboration between Indonesia and the UK in the SPOSI (Strengthening Palm) program Oil Sustainability in Indonesia) which aims to increase and develop palm oil production.

Keywords: *Accountability, Recovery, Sustainability*

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 sebagai wabah darurat kesehatan masyarakat, memberikan dampak besar dalam perekonomian di negara seluruh dunia terutama di Indonesia. Pandemi Covid-19 memberikan tekanan ekonomi, fiskal dan sosial sehingga mengharuskan. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah ingin melakukan analisa akuntabilitas ekonomi Indonesia pasca Covid-19 dalam kolaborasi *recovery* dan *sustainability* dari data statistik pertumbuhan ekonomi di Indonesia beserta Laporan Keuangan Pemerintah maupun tindakan dan upaya yang sudah dilakukan Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam studi penelitian ini dengan tinjauan literatur sistematis. Hasil penelitian terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan atas program serta upaya pemerintah melakukan kolaborasi dalam *recovery* ekonomi dan *sustainability* pasca pandemi Covid-19, menunjukkan sisi positif yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui berbagai macam kebijakan yang diterapkan dan kerjasama dengan negara-negara lain di dunia. Penurunan suku bunga menunjukkan bahwa pada Februari 2021 turun menjadi 3,50% dari sebelumnya sebesar 3,75% di bukan November 2020 sampai Januari 2021 menjadikan momentum perubahan *recovery* perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,31% lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70% dan tahun

2020 saat pandemi Covid-19 terjadi sebesar -2,07%. NPI mencatat di tahun 2021 perekonomian Indonesia mengalami surplus sebesar 13,46 miliar dolar AS lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebesar 2,60 miliar dolar AS. Negara transaksi berjalan pada tahun 2021 mengalami surplus sebesar 3,33 miliar dolar AS. Keberhasilan Pemerintah dalam mengatasi Covid-19 ditunjukkan dengan tingginya neraca transaksi modal dan financial di tahun 2021 sebesar 11,75 miliar dolar AS, lebih tinggi daripada tahun 2020 sebesar 7,92 miliar dolar AS. Kerjasama antara Indonesia dengan Inggris dalam program SPOSI (*Strengthening Palm Oil Sustainability in Indonesia*) yang mempunyai tujuan dalam peningkatan dan pengembangan produksi minyak kelapa sawit.

Kata Kunci: Akuntabilitas, *Recovery*, *Sustainability*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang diduga bermula dari kota Wuhan negara China, pertama kali diinformasikan oleh WHO pada tanggal 31 Desember 2019. Peristiwa ini menggemparkan seluruh dunia yang kemudian setelahnya terjadi *Lockdown* di negara seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia. Peristiwa wabah ini menyebabkan lumpuhnya perekonomian baik di Indonesia bahkan negara seluruh dunia. Dimana orang-orang, dunia bisnis, dan bidang-bidang yang lain tidak bisa melakukan aktifitas normal karena keterbatasan dalam melakukan komunikasi maupun distribusi. Pandemi Covid-19 memberikan tekanan ekonomi, fiskal dan sosial ke seluruh negara di dunia sehingga mengharuskan pemerintah di negara-negara tersebut bertindak cepat dan tepat dalam mengatasi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam mengatasi krisis akibat wabah virus yang mematikan tersebut, sejumlah besar dana publik digunakan melalui berbagai inisiatif di tingkat nasional, regional dan global. Resiko moral dan *hazard* menjadikan tantangan tersendiri pada masa tersebut.

Dampak yang sangat besar akibat pandemi Covid-19 pada pasar tenaga kerja, dimana para pekerja kehilangan pekerjaannya dan harus bisa bertahan hidup. Pangsa lapangan kerja yang menurun drastis mengakibatkan tingkat pengangguran meningkat di daerah perkotaan bahkan sampai ke pedesaan. Produktivitas akan sumber daya manusia juga menjadi menurun karena tidak adanya aktifitas yang bisa memacu adrenalin masyarakat seperti aktifitas semula. Virus Covid-19 yang mewabah ke seluruh wilayah Indonesia memberikan kesulitan bagi pebisnis untuk memotivasi karyawan dimasa pandemi (Puspitasari dkk, 2022). Berbagai tindakan dan kebijakan diambil oleh pemerintah Indonesia untuk dapat memutus mata rantai penyebaran virus ini. Salah satunya dengan usaha mulai melakukan sosialisasi, penetapan undang-undang sebagai acuan dasar hukum penindakan. Banyak masyarakat yang dibuat bingung dengan munculnya pandemi wabah Covid-19 (Syauqi, 2020). Dampak dan pengaruh pada sektor ekonomi yang berimbas sangat besar ke seluruh lapisan masyarakat membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian agar tetap terjaga kestabilan ekonomi di skala mikro dan makro.

Pemerintah Indonesia memberlakukan peraturan untuk mencegah tingkat keparahan wabah Covid-19 dengan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Peraturan tersebut juga diatur dalam Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 31 Maret 2020 (Muhyiddin, 2020). Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2020 pemerintah mengagendakan kebijakan *New Normal* agar dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 tidak menimbulkan krisis yang makin berkepanjangan.

Penanganan Covid-19 pada manajerial makro adalah meliputi tata kelola, infrastruktur pelayanan kesehatan dan pembelajaran organisasi yang berkepanjangan (Sharma et al, 2021). Pembangunan daerah tidak hanya mengedepankan pembangunan fisik semata akan tetapi kapasitas pemerintah menjadi hal terpenting dalam upaya pengendalian kesehatan masyarakat

dan *recovery* ekonomi (Chu et al, 2021). *Recovery* ekonomi global sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara. Tentunya diperlukan kerja sama global dalam memperkuat *recovery* ekonomi yang diarahkan pada kerja sama bidang keuangan dan moneter. Hal ini dapat memberikan ruang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi masing-masing negara, meskipun setiap negara memiliki tantangan yang berbeda-beda. Kerja sama global ini perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan pihak legislatif yang menyentuh substansi antar bidang, multi sektor, geopolitik, ekonomi, sosial, pangan dan lainnya.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah supaya *recovery* perekonomian di Indonesia bisa akuntabel dan *sustainability*. Mulai dari pelonggaran peraturan terkait PSBB, kesempatan para pelaku usaha dan pebisnis untuk membuka kembali usahanya, serta kerjasama Pemerintah dengan dunia internasional. Saat Presidensi G20 Indonesia berlangsung, BPK RI menginisiatif pembentukan SAI20 dan mendorong agar bisa menjadi mitra pemerintah dalam upaya *recovery* perekonomian pasca pandemi Covid-19. *Recovery* ekonomi yang *sustainability* dan menunjukkan kontraksi yang positif baik negara maju dan berkembang tentunya menjadikan suatu hal kemajuan bagi kelumpuhan ekonomi yang terjadi selama ini. Kontraksi ekonomi Indonesia sebesar -2.1% terhitung moderat baik diantara kelompok G-20 ataupun Asean-6, angka tersebut terlihat dari grafik pertumbuhan ekonomi negara G-20 dan Asean-6 yang nampak pada gambar 1 dibawah.

Gambar 1.
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Negara G-20 dan ASEAN-6 (%YOY)



Sumber: IMF & Kementerian Keuangan (2022)

Momentum *recovery* ekonomi yang terus menguat sejak tahun 2021 sejalan dengan pelonggaran restriksi dan umat manusia yang tidak putus-putusnya belajar menyesuaikan diri di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi agar bisa terus produktif dan beraktivitas dengan protokol kesehatan yang lebih baik. Peranan teknologi yang begitu vital sangat membantu terciptanya penyesuaian dan adaptasi di seluruh penjuru dunia. Dari sisi yang lain, sejumlah reformasi sudah dilakukan oleh Pemerintah yang merupakan salah satu ciri positif dan kekuatan dari Pemerintah Indonesia di mata dunia internasional.

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan dalam suatu sesi wawancara menyebut salah satu upaya pembangunan fondasi jangka menengah pasca Covid-19 dengan kinerja positif APBN yang telah dengan bekerja keras untuk melindungi masyarakat juga menjaga momentum pemulihan perekonomian nasional. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan Undang-Undang mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) di tengah kondisi dan situasi yang extraordinary. Kinerja positif yang disajikan sebagai pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Keuangan yang berifat transparan dan akuntabel sesuai dengan anggaran Pemerintah yang dibuat. Berdasarkan *recovery* ekonomi di berbagai

negara pada masa pasca Covid-19 dan atas latar belakang peristiwa di atas maka penulis ingin melakukan analisa akuntabilitas ekonomi Indonesia pasca Covid-19 dalam kolaborasi *recovery* dan *sustainability* dari data statistik pertumbuhan ekonomi di Indonesia beserta Laporan Keuangan Pemerintah maupun tindakan dan upaya yang sudah dilakukan Pemerintah.

KAJIAN PUSTAKA Covid-19

Awal tahun 2020 dunia dihebohkan dengan virus Covid-19, bahkan Indonesia tak luput dari peristiwa tersebut. Virus Covid-19 yang diduga bermula dari kota Wuhan negara China, pertama kali diinformasikan oleh WHO pada tanggal 31 Desember 2019. Setelah diidentifikasi penyebab utamanya dari hewan kemudian menyebar diantara manusia dan menyebabkan kontaminasi seluruh dunia termasuk Indonesia. Banyak kasus penularan terjadi baik melalui kontak fisik antar manusia maupun benda mati (Susilo dkk, 2020). Penularan tersebut semakin rata setelah kepulangan orang-orang dari kota China dan kembali ke negaranya masing-masing. Covid-19 atau *Corona Virus Disease-19* adalah jenis penyakit yang muncul pertama kali di China (Yuliana, 2020). Virus ini menyerang seluruh umat manusia dari mulai balita, anak-anak, remaja, dewasa dan para lansia. Gejala yang ditimbulkan setelah terkena virus Covid-19 diantaranya batuk, pilek, flu, sesak nafa, dan demam. Bahkan ada yang terpapar tanpa menunjukkan gejala dikarenakan imun mereka sedang turun. Perkembangan Covid-19 di Indonesia sudah menurun Sejak Pemerintah menerapkan aturan terkait dengan antisipasi penanganan terhadap penyebaran virus ini. Pemberlakuan peraturan yang ditetapkan Pemerintah memberikan dampak yang positif. Berikut data yang penulis ambil dari website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkaitan dengan Covid-19. Data situasi terkini Covid-19 ditampilkan di dalam gambar 2 dan perkembangan kasus Covid-19 per provinsi ditampilkan di dalam gambar 3 dibawah.

Gambar 2.
Situasi Covid-19 Di Indonesia



Sumber: Kemenkes (2022)

Gambar 3.
Grafik Perkembangan Kasus Covid-19 Per Provinsi



Sumber: Kemenkes (2022)

Akuntabilitas

Di Indonesia konsep akuntabilitas bukan hal yang baru. Mayoritas instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas dalam menjalankan fungsi administrative pemerintahan. Hal ini merupakan tuntutan dari masyarakat dan mulai didengungkan kembali pada awal reformasi tahun 1998. Masyarakat menuntut dikarenakan pada masa orde baru tersebut konsep akuntabilitas tidak mampu di terapkan oleh Pemerintah dalam setiap lini pemerintahan sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan. Akuntabilitas bisa diartikan sebagai kewajiban pertanggungjawaban Keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui pertanggungjawaban yang dilakukan secara bertahap (Stanbury, 2003). Akuntabilitas adalah ukuran yang ditunjukkan untuk mengetahui aktivitas birokrasi publik yang dilakukan susah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat (Wahyudi, 2005:3).

Akuntabilitas sebagai keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat akuntabel atau dapat diperhitungkan (Waluyo, 2007:190). Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan yang diperuntukkan bagi semua orang dalam memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah yang berkaitan dengan informasitentang kebijakan, proses pembuatan dan hasil (Lalolo, 2003:13). Akuntabilitas yaitu sikap berkelanjutan untuk menanyakan suatu hal dalam upaya membangkitkan situasi dan keinginan pencapaian suatu prestasi atau hasil yang diharapkan (Bachtiar, 2008). Proses untuk melihat tindakan mendapatkan sesuatu, memecahkan sesuatu, mengerjakan sesuatu dan pemeliharaan atau penyimpanan terhadap kebutuhan dan keinginan atas hasil yang diharapkan.

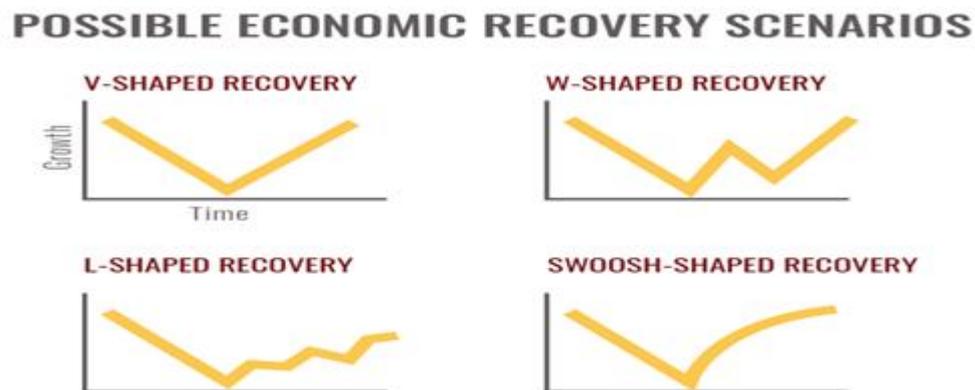
Recovery Ekonomi

Pemulihan atau recovery diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan dalam upaya mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terdampak bencana dan memfungsikan sarana, prasarana dan kelembagaan dengan tujuan melakukan upaya rehabilitasi (UU No 24 Tahun 2007). Dari kamus Wikipedia mengatakan bahwa *recovery* adalah mekanisme yang memungkinkan pengadilan dalam menegakkan suatu hak,

memberlakukan suatu sanksi dan pembuatan perintah pengadilan. Artinya bahwa memperbaiki keadaan menjadi lebih baik atau semestinya. *Recovery* ekonomi merupakan bagian awal dari perluasan atau ekspansi yang mana perekonomian tersebut memperoleh kekuatannya kembali untuk bertumbuh sesudah masa resesi atau pandemic (Nasrudin, 2022). *Recovery* ekonomi yang dimaksud adalah menunjukkan tanda-tanda penguatan. Istilah lain dari pada *recovery* ekonomi adalah *upturn* atau peningkatan ekonomi, *revival* atau kebangkitan ekonomi dan *initial expansion* atau ekspansi awal.

Gambar 4.

Skenario *Recovery* Ekonomi



Sumber: *World Economic Forum*, diolah penulis (2022)

V-shaped menunjukkan stimulus ekonomi mendorong *recovery* yang cepat dan cepat mencapai ekspansi. *U-shaped* menunjukkan *recovery* membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum menuju ekspansi dibandingkan dari yang berbentuk V. *W-shaped* menunjukkan pertama stimulus ekonomi mendorong *recovery* ekonomi, tapi tidak cukup untuk menggerakkan ekspansi perekonomian. Kedua stimulus ekonomi kemungkinan dapat menghindarkan ekonomi dari resesi yang lebih lama dalam proses *recovery* menuju ekspansi. *L-shaped* menunjukkan kondisi ekonomi masih dalam posisi stagnan dan proses *recovery* memerlukan waktu lebih, bahkan saat Pemerintah sudah meluncurkan stimulus ekonomi.

Sustainability

Beberapa ahli mendefinisikan *sustainability* atas dasar persepsi yang berbeda. *Sustainability* adalah suatu proses pembangunan masyarakat untuk keseimbangan ekonomi, sosial dan tujuan ekologi (Szekely, 2005). Pendekatan yang digunakan dalam mengukur *sustainability* suatu organisasi dengan *triple bottom line* yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. *Sustainability* merupakan upaya masyarakat dalam memprioritaskan respon sosial terhadap masalah ekonomi dan lingkungan (Meadows et al, 1972). Konsep ini kemudian terus berkembang dan diterapkan dalam berbagai konteks. Dalam konsep *sustainability* setiap organisasi atau perusahaan wajib menyusun laporan. Hal ini diharapkan mampu menjadi alat komunikasi atau bukti dasar bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui kinerja yang sudah dilakukan.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam studi penelitian ini dengan tinjauan literatur sistematis (Barricelli et al., 2019). Studi literatur mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi, menafsirkan dan mengevaluasi berbagai penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik dan minat kajian. Tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan penulis

melalui: 1) studi identifikasi; 2) pilihan kajian; 3) penilaian kualitas dan relevansi; 4) ekstraksi dan perpaduan data. Menurut penulis metode ini tepat untuk digunakan karena memuat sistematis kajian literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan dan diusahakan menunjukkan kondisi mutakhir dari bidang ilmu tersebut "*the state of the art*".

Penulis melakukan langkah pertama studi indentifikasi dengan penentuan tujuan penelitian yang dibahas pada bagian diskusi. Tinjauan literatur memiliki tujuan untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan baru terhadap kesenjangan dan perbedaan di penelitian sebelumnya. Publik manager sangat diperlukan untuk mengembangkan potensinya dalam membangun kolaborasi bagi akuntabilitas *recovery* dan *sustainability* ekonomi. Proses pencarian melalui google, google scholar dan beberapa tinjauan website lembaga resmi yang relevan dengan penelitian ini. Langkah yang kedua pilihan kajian, penulis mendeskripsikan pencarian melalui beberapa syarat dan kriteria. Penulis membatasi hasil penelitian tertentu guna proses identifikasi hasil pencarian dengan tema yang relevan diterbitkan pada tahun 2020 – 2022. Berikutnya penulis akan membatasi pencarian dalam berbagai bidang keilmuan yaitu: sosial politik, manajemen, multi disiplin, administrasi public dan kesehatan dalam perspektif pasca Covid-19.

Langkah yang ketiga, penulis melakukan penilaian terhadap kualitas dan relevansi dengan tujuan penelitian. Tahapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan akurasi baik kejelasan substansi, metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan referensi, konsistensi dan waktu penelitian diterbitkan. Membaca abstrak setiap sumber referensi di awal untuk menemukan relevansi dengan penelitian ini. Sumber referensi yang tidak memenuhi kriteria diatas, desain dan pendekatan penelitian tidak jelas serta tidak menjawab pertanyaan penelitian maka penulis tidak akan menjadikan sebagai bahan dan sumber referensi untuk penelitian ini. Langkah terakhir yang keempat ekstraksi dan perpaduan data dengan melakukan kategorisasi melihat judul jurnal, rincian publikasi dan sintesis dengan deskriptif. Penulis melakukan penyusunan dan meringkas hasil penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut data update untuk *recovery* PDB Riil Indonesia yang dilaporkan sebesar 5.7 % pada bulan September 2022. Rekor ini naik dibanding sebelumnya bulan Juni 2022 sebesar 5.4 %. Data pada gambar 5 dikategorikan dalam *Global Economic Monitor World Trend Plus – Table: Real GDP: Y-o-Y Growth: Quarterly: Asia*.

Gambar 5.



Sumber: *CEIC Data*, diolah penulis (2022)

Standardisasi pelatihan teknis dan pendidikan dalam negeri mampu memberikan kekuatan untuk pembentukan infrastruktur publik dan swasta (Gobel, 2020). Sehingga dapat memperkuat perkembangan pasar domestik, memberikan peluang bagi produsen kecil dan menengah dalam semua aspek perdagangan, investasi dan pariwisata. Hal ini dimanifestasikan melalui desain strategi umum dan adil bagi semua produsen yang dilakukan secara efisien agar dapat memberikan rasa kenyamanan bagi konsumen di dalam dan di luar negeri.

Diperlukan adanya suatu integrasi kebijakan tata kelola pemerintahan pusat dan daerah, dalam upaya menciptakan koordinasi dan kerjasama untuk menangani pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid 19 (Chaerunisyah, 2021). Masih perlu diberlakukan hukuman yang jelas bagi pelanggaran kebijakan pasca Covid-19. Kebijakan-kebijakan pasca Covid-19 yang dibuat oleh pemerintah Indonesia diantaranya yaitu tidak berlaku karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri, tidak berlaku kewajiban tes Covid-19 meliputi PCR maupun Rapid tes, Sekolah dilakukan secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat, pelaksanaan ibadah sholat berjamaah di masjid atau lapangan terbuka, diperbolehkan mudik dengan syarat sudah vaksin ketiga, dan pelanggaran pemakaian masker di ruangan terbuka (Subagyo, 2022).

Pemerintah pasca pandemi Covid-19 dihadapkan kepada penataan kembali pada sektor ekonomi, sosial dan kesehatan yang disebabkan Covid-19 (Taufik, 2022). Pembangunan kembali melalui kolaborasi lintas sektor, agar berhasil sangat didukung kemampuan manajer publik yang terampil. Manajer public memiliki kesempatan memeriksa sejumlah opsi saat menangani sejumlah tantangan dari Pemerintah. Cara pandang Pemerintah dengan model birokrasi traditional dapat ditinggalkan menuju birokrasi adaptif, fleksibel, inovasi dan kolaborasi. Kolaborasi yang dilakukan dengan berbagai pihak tentunya diperlukan untuk pembangunan akuntabilitas perekonomian Indonesia pasca Covid-19. Pembangunan juga meliputi PRK (Pembangunan Rendah Karbon) dan *green* ekonomi yang memerlukan dukungan swasta, akademisi, masyarakat, bahkan UMKM yang mampu menopang kebangkitan ekonomi pada masa-masa pandemi Covid-19. Pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan *enabling environment* bagi para pelaku usaha melalui bermacam kebijakan, stimulus fiskal hijau, dan investasi infrastruktur ramah lingkungan.

Pemberian insentif atau stimulus kepada pelaku UMKM dan korporasi dengan memberikan penundaan baik angsuran dan subsidi bagi bunga kredit perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penjaminan modal kerja hingga Rp10 miliar dan insentif pajak. Misalnya PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah. Memberikan insentif pajak korporasi antara lain bebas PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN. Restrukturisasi debitur dengan penempatan dana Pemerintah di perbankan dan penjaminan modal kerja bagi korporasi yang prioritas dan strategis (Kemenkeu, 2022). Untuk mendukung *recovery* perekonomian Indonesia, Bank Indonesia berusaha menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga untuk peningkatan likuiditas keuangan, pembelian Surat Berharga Negara, stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan.

Gambar 6. Perkembangan Penyesuaian Suku Bunga BI 7 Day-RR Rate 2020-2021



Sumber: Kemenkeu (2022)

Kebijakan penurunan suku bunga kredit perbankan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia, meningkatkan pembiayaan pada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas dan secara cermat memonitoring dampak perekeonomian Indonesia pasca Covid-19. Penurunan suku bunga pada gambar 6 menunjukkan bahwa pada Februari 2021 turun menjadi 3,50% dari sebelumnya sebesar 3,75% di bukan November 2020 sampai Januari 2021 menjadikan momentum perubahan *recovery* perekonomian nasional.



Gambar 7. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2016-2022

Sumber: BPS (2023)

Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,31% lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70% dan tahun 2020 saat pandemi Covid-19 terjadi sebesar -2,07%. Tingkat pertumbuhan ini merupakan peran Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di semua lapisan lapangan usaha.

Tabel 1. Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2020-2021
(dalam miliar dolar AS)

Uraian	TW I 2021	TW II 2021	TW III 2021	TW IV 2021	Tahun 2021	Tahun 2020
Transaksi Berjalan <i>Current Account)</i>	-1,10	-1,96	4,97	1,42	3,33	-4,43
Transaksi Modal dan Finansial <i>Capital & Financial Account)</i>	5,74	1,66	6,71	-2,35	11,75	7,92
Selisih Perhitungan Bersih <i>Net Errors & Omission)</i>	-0,58	-0,15	-0,99	0,10	-1,62	-0,89
Neraca Keseluruhan <i>Overall Balance)</i>	4,06	-0,45	10,69	-0,84	13,46	2,60

Sumber: Kemenkeu (2022)

Recovery perekonomian Indonesia terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Surplus ini merupakan kontribusi atas neraca transaksi finansial dan modal yang mengalami peningkatan seperti ditunjukkan pada tabel 1 diatas. Dalam Neraca Pembayaran Indonesia tercatat bahwa di tahun 2021 mengalami surplus sebesar 13,46 miliar dolar AS lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebesar 2,60 miliar dolar AS. Kontribusi dari komoditas sumber daya alam seperti batu bara, CPO dan bijih logam menjadi permintaan ekspor yang cukup tinggi pasca Covid-19 sehingga neraca transaksi berjalan pada tahun 2021 mengalami surplus sebesar 3,33 miliar dolar AS. Keberhasilan Pemerintah dalam mengatasi Covid-19 ditunjukkan dengan tingginya neraca transaksi modal dan finansial di tahun 2021 sebesar 11,75 miliar dolar AS, lebih tinggi daripada tahun 2020 sebesar 7,92 miliar dolar AS. Hal ini terjadi karena kepercayaan para investor asing terhadap prospek perekonomian di Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam siaran Pers HM.4.6/126/SET.M.EKON.3/06/2021 Menko Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan penguatan sertifikasi ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) dan mengimplementasikan beberapa praktik *sustainability* seperti SVLK (*Timber Legality Assurance System*) dan SNARPI (*Sustainable Natural Rubber Platform*). Menko Airlangga sangat mengapresiasi kerjasama antara Indonesia dengan Inggris dalam program SPOSI (*Strengthening Palm Oil Sustainability in Indonesia*) yang mempunyai tujuan dalam peningkatan dan pengembangan produksi minyak kelapa sawit *sustainability*. Hal ini dalam upaya memperkuat kapasitas pengusaha kecil dan memperbagus penerimaan produk minyak sawit Indonesia di kancah internasional.

Melalui pemberitaan di Media Indonesia (2022), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau SAI (*Supreme Audit Institutions*) yang merupakan bagian dari negara G20 mempunyai peran besar dalam memastikan peningkatan kinerja dan akuntabilitas lembaga sektor publik dan efektivitas program kebijakan masing-masing negara. Saat Presidensi G20 Indonesia berlangsung, BPK RI menginisiatif pembentukan SAI20 dan mendorong agar bisa menjadi mitra pemerintah dalam upaya *recovery* perekonomian pasca pandemi Covid-19 melalui fungsi-fungsi *oversight*, *insight* dan *foresight*. Fungsi *oversight* untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan, *insight* memberikan wawasan tentang kebijakan publik dan *foresight* tinjauan atas pilihan alternatif di masa depan (Victoria, 2022).

Pembentukan SAI20 sebagai platform pertemuan negara-negara Anggota G20 bertujuan memberikan kontribusi kepada pemimpin G20 di dalam wilayah yang transparansi, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Membangun kemitraan global dengan beragam pemangku kepentingan di dalam ekosistem dan kelompok G20. Tentunya penggabungan kelompok ini dapat mendorong pemerintah agar mampu menegakkan

akuntabilitas ekonomi Indonesia pasca Covid-19. Hal ini menjadi sarana untuk pemeriksaan atas program serta upaya pemerintah melakukan kolaborasi dalam *recovery* ekonomi dan *sustainability*.

SIMPULAN

Pasca pandemi Covid-19 Pemerintah melakukan penataan kembali pada berbagai sektor yaitu ekonomi, sosial dan kesehatan akibat Covid-19. Pembangunan kembali kemerosotan ekonomi, sosial, kesehatan, infrastruktur dan hal-hal yang kompleks melibatkan para pemangku kepentingan dengan kolaborasi *recovery* ekonomi dan *sustainability* bagi akuntabilitas perekonomian Indonesia. Beberapa langkah Pemerintah yang telah dilakukan pemberian insentif atau stimulus kepada pelaku UMKM dan korporasi dengan memberikan penundaan baik angsuran dan subsidi bagi bunga kredit perbankan melalui Ultra Mikro dan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Untuk mendukung *recovery* perekonomian Indonesia, Bank Indonesia berusaha menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga untuk peningkatan likuiditas keuangan, pembelian Surat Berharga Negara, stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan.

Penurunan suku bunga menunjukkan bahwa pada Februari 2021 turun menjadi 3,50% dari sebelumnya sebesar 3,75% di bulan November 2020 sampai Januari 2021 menjadikan momentum perubahan *recovery* perekonomian nasional. Data Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,31% lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70% dan tahun 2020 saat pandemi Covid-19 terjadi sebesar -2,07%. NPI mencatat di tahun 2021 perekonomian Indonesia mengalami surplus sebesar 13,46 miliar dolar AS lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebesar 2,60 miliar dolar AS. Neraca transaksi berjalan pada tahun 2021 mengalami surplus sebesar 3,33 miliar dolar AS. Keberhasilan Pemerintah dalam mengatasi Covid-19 ditunjukkan dengan tingginya neraca transaksi modal dan financial di tahun 2021 sebesar 11,75 miliar dolar AS, lebih tinggi daripada tahun 2020 sebesar 7,92 miliar dolar AS.

Kerjasama antara Indonesia dengan Inggris dalam program SPOSI (*Strengthening Palm Oil Sustainability in Indonesia*) yang mempunyai tujuan dalam peningkatan dan pengembangan produksi minyak kelapa sawit. Hal ini dalam upaya memperkuat kapasitas pengusaha kecil dan memperbagus penerimaan produk minyak sawit Indonesia di kancah internasional. Hadirnya SAI20 di dalam komunitas G20 yang mampu memberikan harapan atas *recovery* serta pertumbuhan inklusif dan *sustainability*. Dengan memperkenalkan perspektif tinjauan untuk masa depan (*foresight*) dan melengkapi fungsi-fungsi alternatif kebijakan Pemerintah (*insight*) pada kelompok negara G20. Hasil penelitian dari analisa perspektif penulis terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan atas program serta upaya pemerintah melakukan kolaborasi dalam *recovery* ekonomi dan *sustainability* pasca pandemi Covid-19, menunjukkan sisi positif yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui berbagai macam kebijakan yang diterapkan dan kerjasama dengan negara-negara lain di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Barricelli, B.R., Cassano, F., Fogli, D., and Piccino, A. (2019). End-user development, end-user programming, and end-user software engineering: A systematic mapping study. *Journal of System Software*, 149, 101–137.
- Biro Pusat Statistik. (2023). <https://www.bps.go.id/>

- Chaerunisyah, A. (2021). Implementasi Kebijakan Good Governance Pemerintah DKI Jakarta Dalam Menangani Pandemi Covid-19. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 2(1), 117–125. <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/68>
- Chu, Z., Cheng, M., & Song, M. (2021). *What determines urban resilience against COVID-19: City size or governance capacity?* *Sustainable cities and society*, 75 (Agustus), 103304. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103304>
- Gobel, Y. P. (2020). Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Dengan Mengkombinasikan Model Filantropi Islam Dan Ndeas Model. *Jurnal Tabbaru*, 3(2), 209–223.
- Jiang D, Wang X and Zhao R. (2022). *Analysis on the Economic Recovery in the Post-COVID-19 Era: Evidence From China*. *Front. Public Health* 9:787190. doi: 10.3389/fpubh.2021.787190.
- Kemendes. (2022). <https://www.kemdes.go.id/>
- Kemendek. (2022). <https://pen.kemendek.go.id/>
- Kitchenham, B. (2004). *Procedures for Performing Systematic Review*. <https://doi.org/10.1145/3328905.3332505>
- Lalolo, Liona. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: BAPPENAS.
- Media Indonesia. (2022). <https://mediaindonesia.com>
- Muhyiddin, M. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240-252. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>
- Nasrudin, A. (2022). Pemulihan Ekonomi: Definisi, Jenis dan Karakteristiknya. *Siklus Bisnis*. Retrieved from <https://cerdasco.com/>
- Novianti, N and Wizanasari. (2022). Analisa Manajemen Keuangan Dan Strategi Pengembangan Café ABC. Retrieved from <https://mail.journal.moestopo.ac.id/index.php/jmb/article/view/2310>
- Pratiwi, D. K. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 37–52. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.929>
- Puspitasari, A. T. & Anggaria, D.G. (2022). Studi Literatur Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kompensasi Yang Diterima Oleh Karyawan. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 43(1), 45–59. <http://dx.doi.org/10.47313/jib.v43i1.1473>
- Shahib, H. M. (2021). Towards the Local Government's Integrated Accountability Framework: A Critical Lesson from Socio-Environmental Issues in Indonesia. <https://doi.org/10.1007/978-981-33-6617-6>
- Sharma, A., Borah, S. B., & Moses, A. C. (2021). *Responses to COVID-19: The role of governance, healthcare infrastructure, and learning from past pandemics*. *Journal of Business Research*, 122 (102), 597-607. <https://doi.org/10.1016/j.busres.2020.09.011>
- Stanbury, W.T. (2003). *Accountability To Citizens In The Westminster Model Of Government: More Myth Than Reality*. Fraser Institute Digital Publication: Canada.
- Susilo, C, dkk (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. Vol.7 No.1 Maret 2020.
- Syauqi, A. (2020). JALAN PANJANG COVID19. *JKUBS*, 1(1), 1-19. Retrieved from <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jkubs/article/view/115>.
- Szekely and Knirsch (2005), *Responsible leadership and corporate social responsibility : Metrics for sustainable performance*.
- Taufik, dkk. (2022). Membangun Kembali Pemerintahan Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Transformativ*, 8(2), 264–284. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.02.6>
- Triana Pangaribuan, M., & Imam Munandar, A. (2021). Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 1–9.
- Victoria, AO. (2022). Peran SAI20 Mengawal Akuntabilitas dan Transparansi G20 [Antara]. Diperoleh dari URL: <https://www.antaraneews.com/berita>

- Wahyudi Kumorotomo, Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi, Magister Administrasi Publik (MAP) dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Waluyo. 2007. Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Cetakan 1. Bandung: Mandar Maju.
- [WHO] World Health Organization. COVID-19: *A global pandemic*. European Chemical Bulletin; 2020.
- Yuliana. (2020). Corona Virus Disease (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur. *Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), 187-192.